

BULETIN KNTI CADIK NELAYAN

SENIN, 02 FEBRUARI 2026

www.knti.or.id

Cuaca ekstrem bebani nelayan kecil, KNTI catat 95% desa pesisir terdampak



Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengungkapkan bahwa cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir kian mengancam kelangsungan hidup nelayan kecil di berbagai wilayah pesisir Indonesia. Ketua Umum KNTI Dani Setiawan mengatakan, sebanyak 95% nelayan di lebih dari 350 desa pesisir terdampak cuaca buruk. Selain itu, sebanyak 63% nelayan bahkan terpaksa menghentikan aktivitas melaut sementara akibat tingginya risiko keselamatan di laut (Bisnis.com)

KKP: 19 Kampung Nelayan Merah Putih mulai beroperasi



Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan sebanyak 19 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) telah rampung 100 persen dan mulai beroperasi, sebagian sudah siap digunakan dan telah melakukan ekspor perdana. KKP menargetkan 65 titik selesai pada Mei 2025, dengan 35 titik di antaranya rampung pada akhir Januari 2026. Meski terkendala cuaca ekstrem, Doni menegaskan pembangunan akan terus dikejar sesuai target (Antaranews)



KNTI usulkan SPBU untuk nelayan dapat lebih diperbanyak

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengusulkan agar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan atau SPBUN dapat lebih diperbanyak. Jika SPBUN ini ditambah maka penyaluran BBM untuk nelayan akan lebih mudah dan nelayan dapat memperoleh BBM di daerah yang terjangkau sehingga tidak menambah beban ongkos bagi nelayan. "Jadi salah satu yang menyebabkan serapan BBM bersubsidi yang sangat rendah setiap tahun untuk sektor perikanan, menurut kami atau keyakinan kami, itu juga disebabkan karena titik-titik distribusi BBM bersubsidi itu sangat sedikit," kata Dani Setiawan, Ketua Umum KNTI. KNTI juga mengusulkan penyederhanaan birokrasi terhadap syarat-syarat administratif bagi para nelayan tradisional dan juga terkait dengan pengurusan untuk pendirian SPBUN (Antaranews)

KKP Bakal Bikin 1.500 Kapal Tangkap Ikan untuk Nelayan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan rencana pembangunan 1.500 kapal tangkap ikan untuk nelayan akan dimulai secara bertahap mulai tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor perikanan nasional. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta mengatakan dari total 1.582 kapal yang akan dibangun, 1.000 di antaranya berkapasitas 30 GT, nanti rencananya akan dibagi di Kampung Nelayan Merah Putih. Tahapan pembangunan kapal dimulai tahun ini dengan beberapa unit yang sudah mulai direalisasikan, kemudian bertahap pada 2027 hingga 2028. Ia menyebut seluruh kapal dipastikan diproduksi di dalam negeri (Liputan6)

Nelayan Keluhkan Kerusakan Lingkungan di Batam Semakin Luas

Para nelayan di pesisir Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, menjadi korban pertama dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Pemotongan bukit, penimbunan pesisir, hingga penutupan alur sungai membuat nelayan kehilangan mata pencarian. Nelayan Kampung Tua Tanjung Piayu dan Kampung Tua Setengar resah dengan adanya aktivitas pemotongan bukit dan reklamasi di pesisir laut mereka. Aktivitas cut and fill hanya berjarak sekitar 20 meter dari bibir pantai. Masyarakat kampung tua ini sudah tinggal di kawasan tersebut sejak tahun 1980-an. Kini mereka harus menanggung dampak kerusakan akibat pembangunan yang masif di Kota Batam (Tempo)

Sampah Kepung Pantura Tambaklorok, Nelayan Semarang Tertekan

Tumpukan sampah tampak menguasai kawasan dermaga Pantai Utara Jawa (Pantura) di Tambaklorok, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Permukaan laut yang semestinya memantulkan cahaya matahari justru tertutup lapisan limbah mengambang yang tersangkut di sela kapal-kapal nelayan. Berbagai jenis sampah plastik berwarna-warni bercampur dengan popok sekali pakai yang menggelembung, limbah rumah tangga, serta serpihan kayu. Situasi ini berdampak langsung pada aktivitas nelayan Tambaklorok. Jaring yang ditebar ke laut kerap terangkat dalam kondisi berat akibat sampah, bukan hasil tangkapan ikan. Kondisi tersebut semakin ironis karena bertepatan dengan cuaca ekstrem yang melanda wilayah pesisir sejak Desember 2025 (Harian Jogja)

DPD KPPI Sumenep Ajukan 12 Usulan Pembangunan Pesisir dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2027



Dewan Pengurus Daerah Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (DPD KPPI) Kabupaten Sumenep menyampaikan 12 usulan strategis dalam Forum Konsultasi Publik Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2027. Dalam forum itu, DPD KPPI Sumenep menekankan pentingnya pembangunan wilayah pesisir yang berorientasi pada ketahanan lingkungan, perlindungan nelayan, serta pemberdayaan perempuan pesisir yang selama ini masih menghadapi berbagai persoalan struktural.

KAMUS PERIKANAN/KELAUTAN

Perubahan iklim (*Climate Change*) mengacu pada perubahan signifikan dalam suhu dan pola cuaca global selama periode waktu yang panjang. Meskipun perubahan iklim dapat terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari, sejak abad ke-19, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan ini, terutama melalui pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas.

Cadik merupakan buletin mingguan yang diterbitkan oleh DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) sebagai media informasi dan meningkatkan literasi isu kelautan dan perikanan.

Penanggung Jawab
Dani Setiawan, Ketua Umum KNTI

Redaktur :
Rahmadanis

Penata Letak
Rahmadanis

Kegiatan DPD KNTI

- SPBUN Aceh Selatan Rampung, DPW KNTI Dorong Percepatan Operasional
- DPD KPPI Sumenep menandatangani MoU kerjasama KPPI Sumenep dan Bappeda Kab. Sumenep
- Diskusi Publik : Pengurangan kuota BBM Subsidi 2026
- DPP KPPI melakukan audiensi ke Kementerian Perumahan dan Pemukiman

Dokumentasi Kegiatan



Kalender KNTI

- 5 FEB** • Audiensi dengan SECO Balikpapan
- 5 - 6 FEB** • Bazar produk KPPI di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI